

## PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Proyek Pembangunan Jalan Tol Jombang- Mojokerto merupakan proyek jalan yang dikerjakan oleh PT Marga Harjaya Insfrakstruktur (MHI) pada tahun 2007 pembangunan jalan tol Jombang – Mojokerto terbagi menjadi 4 seksi dengan panjang 40,5 kilometer. Jalan Tol Jombang Mojokerto meskipun sudah beroperasi sejak tahun 2016 namun masih menyisakan polemik sampai saat ini, terutama pada seksi 1 dan seksi 2, proses pembebasan lahannya tidak mencerminkan asas- asas keadilan bagi masyarakat. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh saudara HJ. Khusaini salah satu korban pembangunan tol Jombang – Mojokerto :

“Jadi setelah sosialisasi tol Jombang – Mojokerto pemberkasan ternyata banyak di temukan kendala, masyarakat tidak dilibatkan mulai pengukuran itu diukur sendiri, warga tidak dilibatkan dalam penentuan kesepakatan harga mulai penentuan harga dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menentukan kriteria tanah, harga tanah, proses musyawarah P2t bukan layaknya orang mencari kesepakatan bersama dan saya sendiri itu punya sebidang tanah luas nya 559 Meter, saya gunakan buat usaha ayam potong mbak, tetapi usaha kandang saya dirobuhkan secara paksa sebelum ada ganti rugi dan proses musyawarah yang dilakukan oleh BPN melalui P2T ( Panitia Pengadaan Tanah ), sejak saat itu perekonomian saya tersendat mbak sekarang “<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Khusaini, *Wawancara*. Kendal Sari 29 Juni 2017

Dari pihak KontraS Surabaya biro bantuan hukum Jombang menindaklanjuti laporan salah satu korban jamaah pembangunan tol (JKPT) karena melihat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto tersebut hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh saudara Charul Hakim Selaku koordinator kontraS Surabaya biro bantuan hukum Jombang:

Dari laporan –laporan itu kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang juga berupaya melakukan kordinasi dan membedah potensi-potensi yang muncul akibat pembangunan tol yang ada di Jombang, kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang menganalisa dan melakukan diskusi-diskusi tentang pembangunan di Jombang yang tidak melihat hak asasi masyarakat dan kearifan lokal terhadap korban pembangunan tol tersebut, tidak hanya laporan –laporan dari warga tentang ganti

[illegible]

“Prosedur musyawarah p2t itu dalam pembangunan tol menyalahi aturan, kami sebagai orang awam tidak tahu proses p2t dalam penetapan harga, tiba –tiba digusur dan ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan”<sup>3</sup>

”Banyak mediasi yang dilakukan antara warga dengan pemilik project, mediasi ini malah bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pihak DPRD Jombang, DPRD Provinsi, BPN, PEMKAB Jombang, dan POLRES Jombang semuanya bermain dan berlomba menjadi pahlawan warga akan tetapi menikam dari belakang alias bermain-main sehingga sampai sekarang tidak ada kejelasan nasib warga korban tol Jombang – Mojokerto.

<sup>3</sup> Khusaini, *Wawancara*. Kendal Sari 29 Juni 2017

Konsorsium Mahasiwa Jombang (KMJ), BEM UNDAR. Dan kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang.

Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang melalui kesepakatan bersama dengan beberapa elemen organisasi yang datang tersebut untuk membentuk sebuah aliansi dari beberapa organisasi tersebut dengan sebutan GEMPAR (gerakan aliansi masyarakat peduli agraria) Jombang. Gempar melakukan diskusi tentang pembangunan – pembangunan yang di Jombang, bedah film, dan aksi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh saudara Charul Hakim Selaku koordinator gempar (Gerakan Masyarakat Peduli Agraria) :

“Bagaimana data dan fakta kita kumpulkan, data dan fakta itu kita kumpulkan dengan pertama kita melakukan bedah film, dan pada waktu kita melihat lagi gencar – gencarnya isu semen Indonesia kendeng, melihat dari fenomena dari isu semen kendeng Indonesia, kemudian kita berdialektika tentang pembangunan-pembangunan di Jombang dan kita diskusi- diskusi menentukan perangkat aksi dan kita memutuskan untuk melakukan aksi.

Tidak hanya membentuk aliansi gempar, upaya strategi dan bentuk Kontra Surabaya biro bantuan Hukum Jombang melakukan upaya pendampingan korban tol Jombang yaitu memberikan edukasi ke warga bagaimana menyampaikan tuntutan dan pendapat di muka umum contohnya seperti dengan melakukan dialog dan kajian – kajian dengan menganalisis pasal UU no 39 TAHUN 1999 tentang hak asasi manusia. (HAM). Hal ini senada diungkapkan oleh koordinator kontra Surabaya biro bantuan hukum Jombang:

“Kita memberikan diskusi ke warga -warga yang terdampak tol Jombang – Mojokerto mengenai hak politik, hak budaya, hak ekonomi bagaimana semestinya di

strasi terhadap tahapan-tahapan dalam pembangunan tol Jombang – Mojokerto.

\* Kita juga memastikan bahwa apakah UU no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan teknisnya berdasarkan Perpres 71 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum apakah sudah di jalankan dengan terbuka dan akuntabel dan investigasi ini berkaitan dengan tentang pelaksanaan teknisnya, sudahkah di jalankan oleh benar oleh BPJT atau belum .<sup>5</sup>

Kontras surabaya biro bantuan hukum Jombang yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan – kebijakan penguasa tol yang deskriminatif serta memperjuangkan aspirasi masyarakat korban tol yang tertindas . Apabila dihadapkan dengan teori strategi pelapisan dari flowler, maka Kontras

<sup>5</sup> Charul Hakim, Wawancara, Mojongapit, 17 Juni 2017

di dalam sebuah gerakan yaitu gerakan masyarakat sipil ( *civil society* ) yang terdiri dari Women Crisis Center Jember, Gerakan Perempuan Indonesia ( GMPI) Jombang, Lapeksda Jombang ( HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Jombang ( HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Jombang ( KMJ), BEM UNDAR dengan pemerintah bahwa ada hak- hak masyarakat sipil dalam pembangunan tol Jombang – Mojokerto yang menimbulkan polemik dan kerugian terutama pada korban banjir di Mojokerto .

p *civil society* yang di jelaskan oleh As hikam Kon  
 Jombang adalah salah satu elemen *civil society*  
 mbangunan tol Jombang – Mojokerto konsep  
*Voluntary* ) kontras Surabaya biro bantuan huku  
 ni permasalahan dalam tol Jombang Mojoker  
 n beberapa upaya yang di lakukan untuk menuntut  
 okerto yang tidak melihat unsur HAM. Hal ini ser  
 y kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang :

bak ya kontras Surabaya biro bantuan hukum Jomb  
g spesifik pro bunuh, jadi kita Menangani kasus –kas



free dan wajib bagi kita mbak dalam penanganan meskipun kita di minta atau tidak di minta.<sup>6</sup>

Konsep yang kedua yaitu kemandirian tinggi berhadapan dengan negara kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang sebagai elemen *civil society* mempunyai kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara tanpa campur tangan dengan pemerintah, jadi biaya operasional dalam penanganan kasus tol Jombang – Mojokerto dari usaha mandiri, hal ini senada diungkapkan oleh koordinator kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang :

“Perlu mbak ketahui dana dalam pendampingan penanganan tol Jombang- Mojokerto ini berasal dari usaha mandiri yaitu kedai Perdikan mbak. dan di sini kita nyata tidak mengambil keuntungan apapun, jadi kita fokus untuk memperjuangkan hak hak rakyat yang menjadi korban pembangunan tol yang tidak melihat hak asasi manusia dan kami harus bisa mengawal sampai warga mendapatkan keadilan dalam pembangunan tol tersebut, dan masyarakat punya hak untuk sejahtera mbak”<sup>7</sup>

Menurut Suharko, Strategi Advokasi atau disebut pendampingan bahwa strategi advokasi atau yang biasa disebut pendampingan ini merupakan strategi utama yang di gunakan oleh kalangan NGO baik di Negara –negara maju maupun di Negara Negara berkembang, strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesakkan perubahan –perubahan sosial seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumber daya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan menciptakan dan memelihara perdamaian di daerah daerah rawan konflik. Strategi advokasi akan efektif untuk memaksakan perubahan kebijakan pemerintah luar.

[illegible]



Upaya pendampingan /advokasi guna menjaga Kesejahteraan dan hak – hak bagi warga jamaah korban pembangunan tol Jombang - Mojokerto dan kontras Surabaya biro bantuan hukum jombang sebagai wakil dari warga korban pembangunan tol Jombang – Mojokerto, warga korban jamaah pembangunan tol Jombang – Mojokerto. Upaya pendampingan di lakukan kontras surabaya biro bantuan hukum Jombang untuk menuntut kebijakan pemerintah dalam pembangunan tol Jombang – Mojokerto yang tidak melihat unsur unsur hak asasi manusia.

**1. Strategi dan bentuk gerakan masyarakat peduli agraria (GEMPAR) sebagai elemen *civil society* pada penggusuran lahan pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto**

Gerakan masyarakat peduli agraria ( gempar ) merupakan salah satu elemen *civil society* pada penggusuran lahan pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto, dalam konsep *civil society* yang di jelaskan oleh AS Hikam yaitu organisasi yang tergabung dalam aliansi gempar atas dasar secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan - kepentingan rakyat, dan kemandirian tinggi terhadap negara, dalam aksi tersebut perangkat yang digunakan aksi hasil dari iuran setiap aliansi gempar yang tergabung, fokus hanya untuk memperjuangkan hak rakyat dalam pembangunan tol Jombang – Mojokerto tanpa mencari keuntungan hal ini senada diungkapkan oleh LakpesdamNU dan Women Crisis Center :

“Lakpesdam dananya dari kerja sama program – program dengan lembaga -lembaga luar negeri yang di atur dalam kesepakatan negara-negara sedunia(PBB) serta usaha lembaga ternak,sawah,milik lakpesdam dan kerjasama usaha dengan kelompok komunitas di Desa dan Kota sedangkan aliansi Gempar pendananya swadaya dari lembaga dan organisasi mahasiswa serta kelompok petani yang tergabung di dalamnya<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Abdul Wahab, wawancara, Kaliwungu 5 Juni 2017

“Kalau Women Crisis Center dapat dari donatur luar negeri sedangkan gempa iuran dari lembaga -lembaga yang beraliansi dalam gempa”<sup>9</sup>

Jika dihadapkan dengan karakteristik gerakan sosial menurut sidnew torrow yaitu tantangan kolektif, gerakan masyarakat peduli agraria melakukan sasaran aksi di mulai pukul 08.00 sampai jam 11.45 di mulai dari kampus Undar Jombang berhenti di ringin contong, dengan menggunakan Perangkat Aksi 1 mobil komando & pengeras suara, 2 bendera merah putih, 10 atribut bendera masing-masing aliansi, 10 Poster Tuntutan, 3 megaphon, 1000 lembar Selebaran statemen. 50 selebaran Pers release jam 09.00 masa aksi sampai di titik ringin contong, yang ke dua karakteristik gerakan sosial menurut sidenew torwow yaitu tujuan bersama yaitu gerakan aliansi masyarakat peduli agraria menggggalang solidaritas dan tanda tangan masyarakat untuk menolak. Aliansi Gerakan Masyarkat Pedulu Agraria Jombang Menuntut penggusuran lahan dalam pembangunan tol Jombang -Mojokerto yang tidak melihat unsur unsur hak asasi pada munusia dalam proses ganti rugi lahan, dan sasaran aksi dilanjutkan menuju gedung DPRD Jombang, yang ke tiga solidaritas dan tantangan kolektif, GEMPAR terdiri dari beberapa organisasi yang sukerela

LapeksdamNU Jombang :

Tidak hanya lapeksdamNU dari Himpunan Mahasiswa Islam Jombang (HMI) dan Women Crisis Center hal ini senada di ungkapkan oleh salah satu dari

Himpunan Mahasiswa Islam Jombang (HMI):

Women Crisis Center :

“Jadi Women crisis center terlibat dalam isu gempa , jadi women crisis center itu melihat dari analisa gendernya selama dampak dari pembangunan tol itu ada perempuan yang terdampak, bukan kaum laki laki saja kan women crisis center mengawal isu tersebut melihat sejauhmana mana sih dampak dari pembangunan tol pada perempuan, kan selama ini perempuan identik mengelola rumah, mengelola sumber daya, perempuan menjadi petani, dari pembangunan tol tersebut perempuan dirugikan karena ganti rugi sawahnya tidak di ganti otomatis perempuan tersebut menjadi pengangguran, dan kerugian dari segi immaterial mbak kan sangat di sayangkan mbak dari pihak perempuan kan perempuan butuh kebutuhan yang

<sup>11</sup> Rosi, wawancara, Jombang 5 juni 2017

Jika dikaitkan pada tipologi gerakan sosial dalam penelitian ini gerakan masyarakat peduli agraria termasuk gerakan sosial khusus (*Specific social Movement*) gerakan masyarakat peduli agraria memilih arah yang jelas untuk memperjuangkan hak hak masyarakat yang terkena dampak korban pembangunan tol Jombang –Mohokerto dan lebih fokus ke agraria, dalam hal ini ganti rugi lahan yang telah digusur apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan berdasarkan tujuannya gerakan masyarakat peduli agraria termasuk tipe *Reform Movement* (Gerakan reformasi) jadi gerakan masyarakat peduli agraria ditujukan untuk mengoreksi atau memperbaiki kebijakan pemerintah dalam pembangunan tol Jombang –Mojokerto yang melihat unsur –unsur hak hak masyarakat yang terhadap pembangunan tol Jombang-Mojokerto. Hal ini senada di ungkapkan oleh koordinator Gempar :

<sup>13</sup> Koordinator Gempar, Charul Hakim, Wawancara, Mojongapit, 17 Juni 2017